

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP SISTEM KADERISASI  
PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK BERBASIS ISLAM**

**(Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**YEDI IRAWAN  
NPM.1521020181**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP SISTEM KADERISASI  
PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK BERBASIS ISLAM**

**(Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)**

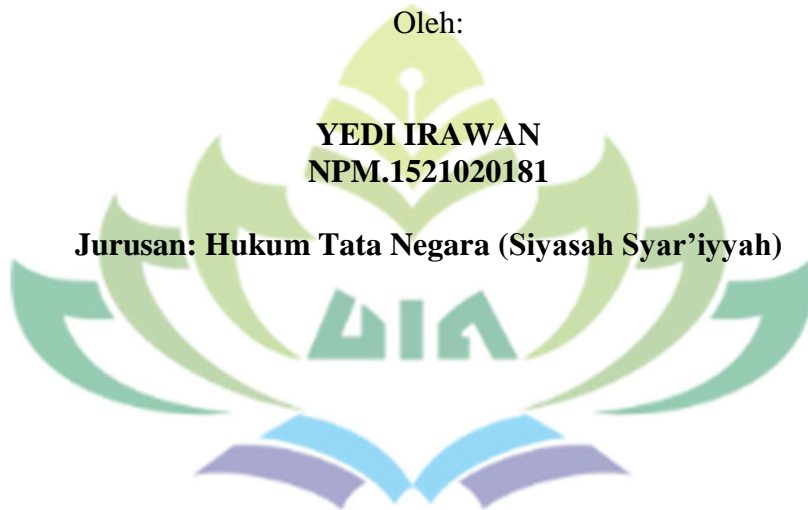
**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**YEDI IRAWAN  
NPM.1521020181**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.  
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai yang berdiri dari banyaknya kaum muslim di Indonesia yang memiliki ideologi yang sama untuk membangun serta mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia setelah era orde baru. Partai politik terkhusus Partai Keadilan Sejahtera menjadi sarana mencetak kader-kader atau bakal calon pemimpin untuk menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yang telah Allah SWT jadikan sebagai salah satu dari dua unsur pokok yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Dimana umat Islam tidak akan mendapatkan khairiyah (kebaikan), keberuntungan dan Izzah (kemuliaan), kecuali setiap individu muslim yang ada pada umat ini baik laki-laki maupun perempuan mau melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah: Bagaimana sistem kaderisasi perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung?, dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem kaderisasi perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung. Dan Untuk mengetahui bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dalam sistem kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak dibedakan. Sistem kaderisasi perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera memiliki relevansi dengan *fiqh siyasah*, dimana keduanya memiliki argumentasi yang sama mengenai pelibatan perempuan dalam sistem politik yaitu dalam upaya untuk menegakkan kewajiban melakukan *amar makruf nahi mungkar*.

Adapun analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan, perempuan merupakan makhluk dan hamba Tuhan sama seperti laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan menyejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan "*al-ahliyyah*" atau kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut Al-Qur'an saling bekerjasama untuk tugas menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial) atau untuk menegakkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yedi Irawan  
NPM : 1521020181  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan oleh Partai Politik Berbasis Islam**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2020

Penulis,



Yedi Irawan  
NPM: 1521020181





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan  
oleh Partai Politik Berbasis Islam”

**Nama :** Yedi Irawan

**NPM :** 1521020181

**Jurusan/Prodi :** Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Fakultas :** Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

NIP.195707051989031001

Pembimbing II,

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP.197512302003121002

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **"Analisis Fiqh Siyasah terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan oleh Partai Politik Berbasis Islam"** Disusun oleh: Yedi Irawan, NPM: 1521020181, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/ Tanggal : Senin, 29 Juni 2020.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Marwin, SH., MH

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**NPM. 19621021993031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

(Q.S. An-Nisaa' [4]:59)



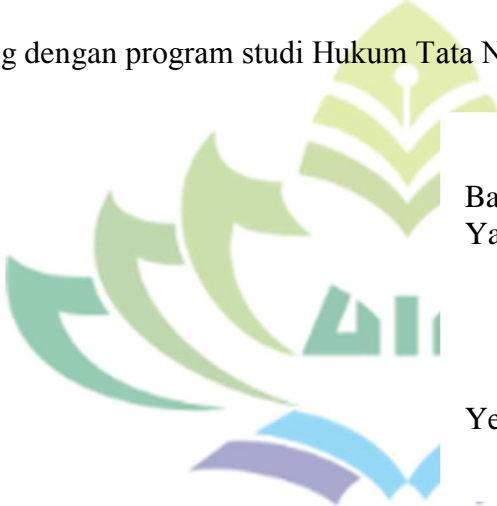
Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta kehormatan saya yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Nida dan Ayah Hoiril yang tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, yang tak bosan-bosannya memotivasi serta menasehati penulis dan memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Mertua penulis yang tercinta Bapak H. Kabul dan Ibu Aminah yang telah memberikan semangat kepada penulis setiap harinya.
3. Kakak dan ayuk penulis Neti Marlina, Lena Hartati, Dedi Haryanto, Doni Kamarullah (alm) yang menjadi semangat serta keceriaan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam susah dan senang.
4. Istri tercinta juga calon anakku tercinta yang selalu menemani penulis dalam memperjuangkan karya tulis ilmiah ini dalam susah maupun senang.
5. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa yang baik kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Almamater tercinta yang telah menjadikan penulis mahasiswa yang berilmu dan religius yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



Yedi Irawan, dilahirkan pada 09 Oktober 1996 di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Tanggamus, merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara, dilahirkan dan dibesarkan oleh Ibunda tercinta Nida dan Ayahanda tercinta Hoiril.

Pendidikan penulis dimulai dari TK Islam Kecamatan Kotaagung pada tahun 2001-2002. Setelah itu melanjutkan di SD Negeri 3Kuripan pada tahun 2003-2008, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1Kotaagung 2009-2011, kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 1Kotaagung pada tahun 2011-2014. Syukur Alhamdulillah dapat mengenyam pendidikan di strata 1 UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah).



Bandar Lampung, 29 Mei 2020  
Yang Membuat,

Yedi Irawan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, atasrahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tata Negara pada jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Semoga kita kelak termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan oleh Partai Politik Berbasis Islam” Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan serta dengan sabar mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyah).

5. Ketua Umum DPD PKS Bandar Lampung Aep Saripudin, SP, Wakil Ketua Umum Grafieldy Mamesah, S.Si, Sekretaris Umum Agus Djumadi, A.md, Bendahara Umum Nandang Hendrawan, SE dan Ketua Bidang Kaderisasi Suprpto, A.Md
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7. Seluruh staf dan karyawan, tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya memperoleh ilmu pengetahuan.
8. Kawan-kawan KKN di Desa Totokarto, Adiluwih, Pringsewu.
9. Kawan-kawan seperjuangan.

Tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritik, masukan dan saran. Akhirnya semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 29 Mei 2020


Penulis,

Yedi Irawan  
NPM: 1521020181



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi



## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	9

## **BAB II KADERISASI PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM**

A. Pengertian Kaderisasi .....	17
B. Peran Perempuan dalam Politik Islam .....	21
C. Hak Politik Perempuan Dalam Islam .....	43
D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perempuan dalam Politik Islam .....	54

## **BAB III GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	
1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera dalam Perpolitikan di Indonesia .....	59
2. Sejarah DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung .....	60
B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera .....	62
C. Struktur Kepengurusan PKS Kota Bandar Lampung .....	63
D. Sistem Kaderisasi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera .....	65

## **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Sistem Kaderisasi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung .....	69
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung .....	71

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat beberapa istilah guna memperjelas pengertian dari judul. Adapun judul skripsi ini adalah sebagai berikut **“Analisis *Fiqh Siyasa* terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan oleh Partai Politik Berbasis Islam (Studi terhadap Partai PKS Kota Bandar Lampung)”**. Sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, duduk perkaranya, dan sebagainya, untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasa* adalah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasa*, *fiqh* itu sendiri adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahid untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh setiap muslim. Sedangkan *siyasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. *Siyasa* pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah. *Siyasa* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan (*politic and policy*).

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58.



3. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Adapun sistem yang dimaksud disini ialah sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam.<sup>2</sup>
4. Kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi tersebut. Selain itu, kaderisasi juga menciptakan kader-kader yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan, bukan paksaan semata.<sup>3</sup>
5. Perempuan adalah sebutan yang digunakan untuk homosapiens berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina.<sup>4</sup>
6. Partai Politik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>
7. Basis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dasar, adapun basis yang dimaksud dalam hal ini adalah partai politik yang berbasis islam.

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 1362.

<sup>3</sup>Azam Tekpal, "Pengertian Kaderisasi" (On-Line), Tersedia di <http://azamtekpal.blogspot.com/2015/arti-kaderisasi.html?m=1> (10 Oktober 2019)

<sup>4</sup><http://www.wikipediapengertianperempuan.com>, (10 Oktober 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam adalah menganalisis berdasarkan *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Penelitian ini belum pernah ada yang menelitinya dan merupakan hasil dari kajian pribadi penulis tanpa mengintervensi karya tulis orang lain.
- b. Berdasarkan fakta yang penulis temui, banyak sekali rekrutmen terhadap perempuan sebagai kaderisasi partai politik terkhusus partai politik Islam yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dalam berpolitik bagi perempuan.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah.
- b. Tersedianya sumber kajian, literatur serta data yang cukup sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai yang berdiri dari banyaknya kaum muslim di Indonesia yang memiliki ideologi yang sama untuk membangun serta

mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia setelah era orde baru. Partai politik terkhusus Partai Keadilan Sejahtera menjadi sarana mencetak kader-kader atau bakal calon pemimpin untuk menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yang telah Allah SWT jadikan sebagai salah satu dari dua unsur pokok yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Dimana umat Islam tidak akan mendapatkan khairiyah (kebaikan), keberuntungan dan Izzah (kemuliaan), kecuali setiap individu muslim yang ada pada umat ini baik laki-laki maupun perempuan mau melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

Mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang *fair* yakni perempuan harus berada dibelakang laki-laki. Pemahaman tersebut ternyata berakar dari salah satunya teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini sungguh tidak relevan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang menurut penafsiran Yusuf Ali diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Kesalahan teologis diatas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat harus diberikan kepada laki-laki dan yang kurang diminatinya barulah disisakan untuk perempuan.

Al-Qur'an menerangkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, Allah SWT Berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). (Q.S. An-Nisa: 34)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 84.



Diterangkan pula dalam hadits sebagai berikut:

لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَرَسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالُوا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Tatkala ada berita sampai kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, “Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita” (H.R. Bukhari no. 4425)

Dalam Hadits lain diterangkan pula sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah], dari [Malik] dari [Abdullah bin Dinar], dari [Abdullah bin Umar] bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata: Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (H.R. Abu Daud no. 2539)

Ayat dan hadits tersebut menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Dalam aspek kepemimpinan partai politik termasuk bentuk mengendalikan kepemimpinan dalam bidang politik, namun, Sepanjang penelusuran pada sumber otoritatif Islam utama Al-Qur'an, tidak ditemukan satu ayat pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa jenis kelamin tertentu yang harus menjadi pemimpin politik. Al-Qur'an justru menyampaikan kisah tentang

pemimpin perempuan di wilayah Saba/Sheba, Yaman. Al-Qur'an tidak menyebut nama perempuan tersebut. Tetapi para ahli tafsir dan sejarawan menyebutnya Ratu Balqis. Dia seorang kepala pemerintahan dari sebuah wilayah yang luas. Kepemimpinannya disebut sukses. Dalam Al-Qur'an, surat al-Naml ayat 23, menyatakan:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۚ ٢٣

Artinya :Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.(Q.S An-Naml: 23)<sup>7</sup>

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasaskan Islam tentunya memiliki cara pandang yang berbeda terkait posisi perempuan dalam partai politik terlebih dalam merekrut dan mengkaderisasi perempuan untuk terjun ke dunia politik dan turut andil dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Indonesia dalam upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan terus berlanjut. Salah satu upaya nyata perhatian negara terhadap perempuan ialah perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan dan kontribusinya *wabilkhusus* dalam partai politik.

Hak untuk turut andil dalam memajukan konstitusi bagi perempuan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 3 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>8</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Partai Politik mengatakan bahwa keterwakilan

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 379.

<sup>8</sup> UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, (Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MK, 2011), Cet-1, H. 29

perempuan pada partai politik itu sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan setiap partai politik.

Sistem rekrutmen terhadap kader partai politik hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 2 Ayat (4) :

1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 20 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
  - a. Partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
  - b. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
2. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
3. Akta notaris sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
4. AD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. Asas dan ciri Partai Politik;
  - b. Visi dan misi Partai Politik;
  - c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. Tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;



- f. Kepengurusan Partai Politik;
- g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
- h. Sistem kaderisasi;
- i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. Peraturan dan keputusan Partai Politik;
- k. Pendidikan politik;
- l. Keuangan Partai Politik; dan
- m. Mekanisme penyelesaian internal Partai Politik.<sup>9</sup>

Pasal 2 Ayat (4) di atas tidak menerangkan secara jelas tentang bagaimana sistem kaderisasi bagi calon anggota partai politik, namun tertera dalam masing-masing AD/ART Partai Politik termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diungkapkan di atas, kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, menganalisis menggunakan *Fiqh Siyasah dusturiyah* dengan judul skripsi analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>9</sup>UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 2.

1. Bagaimana sistem kaderisasi perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui sistem kaderisasi perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik berbasis Islam.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Kegunaan secara teoritis yakni sebagai bentuk kajian ilmu pengetahuan dan literatur terkait sistem kaderisasi perempuan dalam partai politik Islam dan pandangan *Fiqh Siyasah*.
  - b. Kegunaan secara praktis yakni sebagai wawasan bagi penulis serta sumbangsih karya ilmiah sebagai bentuk kecintaan bagi penulis terhadap ilmu pengetahuan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk

memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>11</sup> Disini penulis akan terjun langsung ke lapangan dimana penulis akan meneliti secara hukum Islam bagaimana sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik Islam dan sistem rekrutmen oleh Partai PKS di Kota Bandar Lampung.

### b. Sistem Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Metodelogi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 33.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h.

## 2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yaitu penelitian terjun langsung lapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian.<sup>13</sup> Penelitian ini berlokasi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandar Lampung terkait sistem kaderisasi perempuan oleh partai politik Islam.
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari Al-Qur'an & Hadits, buku-buku, UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, AD/ART Partai Keadilan Sejahtera serta literatur-literatur yang mendukung sumber data primer lainnya.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>14</sup> Populasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kader-kader Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung yang terdiri dari 163 pengurus laki-laki dan 57 pengurus perempuan.

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Ibid*, h. 28

<sup>14</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

## b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga mempunyai karakteristik tertentu, lengkap dan jelas dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>15</sup> Sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* penentuan sampel dengan teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti sendiri menentukan sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga sesuai yang diharapkan dengan penelitian ini. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih.<sup>16</sup> Berdasarkan pendapat di atas penulis mengambil sampel sebesar 10% dari 220 populasi yang terdiri dari 163 pengurus laki-laki dan 57 pengurus perempuan. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 22 Orang yang terdiri dari kader perempuan dan pengurus partai keadilan sejahtera Dewan Pimpinan Daerah kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

- 1) Agus Djumadi, A.Md. (Sekretaris Umum)
- 2) Sofyan Sauri, S.Pd. (Bendahara Umum)

---

<sup>15</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 81.

<sup>16</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 108.



- 3) Drs. Joko Mulyono,MAP. (Ketua Bidang Kaderisasi)
- 4) Nurhandoyo,S.P. (Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi)
- 5) Dinia Rumania,ST (Sekretaris Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi)
- 6) Muhammad Shokiful Asror (Ketua Bidang Kepemudaan)
- 7) Ida Fitriyana, ABM (Sekretaris Bidang Kepemudaan)
- 8) Mugni Ansori (Ketua Bidang Seni dan Budaya)
- 9) Ninuk Endah Susanti,S.Pd. (Sekretaris Bidang Seni dan Budaya)
- 10) Joni Warman (Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga)
- 11) Siti Amalina Santi (Sekretaris Bidang Kepanduan dan Olahraga)
- 12) Yuni Karnelis, S.T.P (Ketua Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga)
- 13) Yulia Elawati inahandayani (Sekretaris Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga)
- 14) Rachmadi (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada)
- 15) Raden Cik Awang,S.T (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada)
- 16) Hendro Sasongko (Ketua Bidang Hubungan Masyarakat)
- 17) Rofianto,S.I.Kom. (Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat)

18) Lydia Agustina, S.Pd (Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Lingkungan Hidup)

19) Suprpto, A.Md (Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah)

20) Heni Nurmaini (Sekretaris Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah)

21) Andi Wahyudi, RO. (Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader)

22) Yeni Fitri (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader).

#### 4. Metode Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Pengamatan dan pencatat secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>17</sup> Observasi pada penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 136 .

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi seperti Ketua DPD PKS Bandar Lampung, pengurus DPD PKS Bandar Lampung serta kader DPD PKS Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Metode pengumpul data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Dokumentasi ini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

<sup>19</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), h. 83.

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>20</sup>
- b. *Koding*, yaitu mengklarifikasi jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori,<sup>21</sup> atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
- d. Sistematisasi data, yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>22</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan sistematis sesuai

---

<sup>20</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Cet ke-1, h. 9.

dengan teori yang ada untuk mencari kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 34.



## **BAB II**

### **SISTEM KADERISASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK**

#### **A. Pengertian Kaderisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kader” memiliki makna orang-orang yang (diharapkan) akan memegang pekerjaan-pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai dan sebagainya. Sedangkan kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi tersebut. Selain itu, kaderisasi juga menciptakan kader-kader yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan, bukan paksaan semata.<sup>1</sup>

Istilah kaderisasi berasal dari kata kader, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang di definisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. dalam definisinya menurut kamus ilmiah, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu partai atau organisasi. Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seorang menjadi pemimpin pengganti dimasa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu

---

<sup>1</sup>Azam Tekpal, “Pengertian Kaderisasi” (On-Line), Tersedia di <http://azamtekpal.blogspot.com/2015/arti-kaderisasi.html?m=1> (10 Oktober 2019)

organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk menggerakkan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.<sup>2</sup>Sedangkan pengertian rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.

Dalam konteks Partai Politik kaderisasi lebih bersifat sebagai suatu proses *intervensi* dari partai politik guna meningkatkan kapasitas individual para anggota partai politik tersebut agar mampu menjalankan fungsi partai. Kemudian daripada itu, secara eksternal, kaderisasi juga berarti penting bagi tanggung jawab partai dalam rangka melakukan pendidikan politik kepada publik. Kaderisasi juga sekaligus digunakan untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang-orang yang berkompeten dan memiliki loyalitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini juga akan ditentukan oleh kecenderungan tipe partai yang bersangkutan.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena hal tersebut merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai kedepannya dan juga merupakan inti dari eksistensi dari partai politik. Tanpa adanya kaderisasi kepemimpinan rasanya sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kaderisasi kepemimpinan adalah

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada 1994), h. 51.

sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Menurut Cholisin, rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Berdasarkan pengertian di atas, rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.<sup>4</sup> Namun dalam kenyataannya, implementasi antara kaderisasi dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional, dimana masih banyak partai yang sulit membedakan antara keduanya.

Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu:

1. Berkepribadian positif
2. Gigih
3. Mempunyai loyalitas

---

<sup>3</sup>Ridho Ferdian, "Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai Dibidang Kepemudaan". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), h.20-21.

<sup>4</sup>Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : UNY Press, 2007), h. 113.

#### 4. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi

Konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan transformasional yang dipopulerkan oleh Bass pada tahun 1985, kedua konsep kepemimpinan tersebut berbasiskan pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin. Sehingga dalam hal ini proses kaderisasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses dalam menggerakkan orang di dalam organisasi untuk memiliki tujuan yang sama demi melanjutkan tongkat ideologi dalam suatu partai atau organisasi. Di dalam organisasi sendiri diperlukan pemimpin untuk memegang kendali atas orang-orang yang berada di dalamnya. Kepemimpinan dari seorang pemimpin tidak lahir begitu saja dari penurunan sifat orang tua kepada anaknya, melainkan melalui kepribadian dan tingkah laku dari seseorang. Dengan demikian, kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki tanggungjawab besar di dalam organisasi untuk mengatur dan memengaruhi orang lain untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam berorganisasi.<sup>5</sup>

Rasulullah saw. merupakan contoh pemimpin luar biasa yang sangat layak kita contoh sistem kaderisasinya. Melalui tangan dinginnya pengaruh Islam menyebar keseluruh pelosok dunia hanya dalam tempo 23 tahun sejak ke-Rasulannya, kader-kader banyak mencatat tinta emas dalam sejarah kehidupan manusia. Sebut saja Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah pengaruh Islam semakin kuat. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah kekuasaan kekaisaran

---

<sup>5</sup> Vietzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 87.

Byzantium dan Persia yang meliputi Palestina, Suriah, Iran, dan Turki tak luput dari penguasaan umat Islam. Sampai saat ini kader-kader Rasulullah terus bermunculan, meneguhkan keberhasilan sistem kaderisasi Rasulullah. Kaderisasi menurut Islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas *khairu ummah* (umat terbaik). Hal ini sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Qur'an :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali-Imran 110)<sup>6</sup>

## B. Peran Perempuan Dalam Politik Islam

Wacana mengenai keterlibatan wanita dalam wilayah politik merupakan permasalahan yang masih menjadi isu utama di berbagai belahan dunia. Pada negara-negara yang sistem demokrasinya telah baik sekalipun, persoalan perempuan dan politik selalu menjadi pokok pembicaraan penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih lagi di dalam negara yang sedang membangun, di mana budaya patriarki<sup>7</sup> masih sangat kental, maka tema wanita dan politik selalu memicu perdebatan sengit. Hal tersebut di latar belakang oleh beragam kepentingan, mulai dari politik, historis, agama hingga tradisi dalam

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.64.

<sup>7</sup>Patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.



masyarakat. Hal tersebut, tidaklah mengherankan, karena memang dalam masyarakat kita terdapat satu “aksioma”<sup>8</sup> bahkan telah menjadi “ortodoksi”<sup>9</sup>, dimana dianggap bahwa kaum pria merupakan pemimpin bagi wanita atau lelaki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan kaum wanita. Ketidakadilan terhadap kaum wanita merupakan praktik kuno umat manusia. Dalam sejarah panjang sejarah umat manusia telah dikonstruksikan bagaimana dunia politik atau dunia publik (*public world*) merupakan aktivitas yang didominasi oleh kaum lelaki, tidak banyak yang mencatat keberhasilan kaum wanita dalam tugas kepemimpinan politik.

Lebih banyak catatan sejarah yang menggambarkan mengenai kedudukan dan peranan kaum wanita secara sosio-budaya berada dalam lingkungan domestik atau rumah tangga (seperti mengurus suami, anak-anak, memasak dan lain sebagainya). Sehingga pada era selanjutnya, wanita yang ingin mandiri dan ikut berpolitik menjadi satu fakta yang tidak dapat diterima, bahkan menurut Betty Friedan (1963), cita-cita yang terdapat dalam diri seorang wanita untuk ikut terlibat dalam sektor publik dipandang sebagai perilaku yang menyalahi kodrat sebagai wanita.<sup>10</sup>

Dalam ayat suci Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Khalifah sering kali diterjemahkan sebagai wakil Tuhan atau pemegang amanat Tuhan di bumi. Yang memiliki peran untuk

---

<sup>8</sup>Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.

<sup>9</sup>Ortodoksi adalah ketaatan kepada peraturan dan ajaran resmi.

<sup>10</sup>Fadli, Yusuf. “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”. *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 2017, h.42.

memakmurkan bumi dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat manusia.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. Al-Baqarah: 30)<sup>11</sup>

Al-Qurthubi menyatakan bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah pada ayat 30 tersebut menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.

Dalam wacana Islam, politik (*al-Siyasah*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang yang luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia dapat muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal maupun komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.6.

kemanusiaan yang panjang. Secara lebih sederhana politik dalam persepsi publik adalah menjadi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif, bupati, gubernur, presiden dan para menteri, hakim pengadilan dan sejenisnya.

Dalam pandangan Islam masalah politik bukan hanya terbatas pada jabatan resmi dalam pemerintahan atau wilayah legislasi semata. Dari dalil-dalil terkait sistem aturan yang ditetapkan Islam menunjukkan bahwa Islam mengatur semua urusan manusia secara tuntas dan menyeluruh. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT, bukan hanya menjelaskan terkait ibadah semata, tetapi islam juga menjelaskan hukum terkait persoalan kehidupan lainnya seperti masalah ekonomi, politik, hukum, dan lainnya.

Kesemua hal tersebut merupakan gambaran kesempurnaan pengaturan Islam dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Penerapan politik Islam yang dijalankan oleh negara sebagai pihak penanggung jawab dan sisi lain ada rakyat yang keterlibatan politiknya ditunjukkan dalam kontribusinya melakukan muhasabah (pengawasan) terhadap kinerja negara akan meniscayakan terjaminnya urusan rakyat. Namun ketika politik hanya dimaknai terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi saja, wajar jika aktivitas politik lebih fokus pada upaya untuk meraih peluang sebesar-besarnya menduduki jabatan kekuasaan dan legislasi.

Salah satu konsekuensinya, perempuan yang tidak terlibat dalam struktur pemerintahan atau legislasi dianggap tidak berperan dalam politik, sekalipun mereka pada faktanya sudah terlibat aktif dalam penyelesaian urusan umat,

mereka aktif terjun di masyarakat demi terealisasinya kesejahteraan umat seperti melakukan dakwah dalam rangka pencerdasan umat.

Mengenai permasalahan kepemimpinan perempuan tidak luput dari polemik dan perdebatan. Di satu sisi ada pihak yang menyatakan perempuan haram menduduki jabatan pemimpin dan di sisi lain ada kelompok yang membuka lebar pintu kepemimpinan untuk diduduki perempuan. Pihak yang mengusung kebolehan kepemimpinan perempuan memiliki dasar dalil-dalil terkait perempuan dalam Islam dimana target mereka ingin menunjukkan bahwa Islam membolehkan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin secara umum. Menurut mereka perempuan secara mutlak boleh menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Ajhzah Dawlah al-Khilâfah*, perempuan dibolehkan menduduki berbagai jabatan selama tidak termasuk dalam wilayah pemerintahan *Khalifah* (Kepala Negara Khilafah), *Mu'awin* (Pembantu Khalifah), *Wali* (Gubernur), *Qadhi qudhat* (Pemimpin para *qâdhi*/hakim), *Qâdhi Mazhâlim* (*Qâdhi*/Hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat Khalifah jika melakukan kezaliman kepada rakyat atau menyalahi Al-Qur'an dan Hadis).<sup>12</sup>

Karenanya menurut beliau perempuan bisa menjadi pegawai dan pimpinan swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk *wilayah alamri/wilayah al-hukm* antara lain sebagai kepala Baitulmal, anggota Majelis Wilayah, anggota Majelis Umat, *qâdhi khushumât* (hakim yang menyelesaikan perselisihan antar

---

<sup>12</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Ajhzah ad-Dawlah al-Khilâfah*, (Beirut: Dar al Ummah, 2005), h.59,113,134,153.

rakyat), *qâdhi hisbah* (hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat).

Kebolehan ini juga berlaku pada jabatan kepala departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan; rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan; dan lain-lain. Prinsipnya, semua posisi kepemimpinan di luar wilayah pemerintahan bisa dijabat oleh perempuan.

Pelarangan jabatan pemerintahan bagi perempuan bukan berasal dari pendapat syekh Taqiyuddin saja. Beberapa ulama lain pun menyatakan demikian seperti Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* menyampaikan pendapat Abu Hanifah bahwa semua jabatan pemerintahan tidak boleh diduduki oleh perempuan.

Adapun jabatan hakim yang memutus perkara-perkara yang dia dibenarkan menjadi saksi di dalamnya boleh dipegang seorang perempuan. Sebaliknya, dia tidak boleh menjadi hakim yang memutus perkara-perkara yang dia tidak dibolehkan menjadi saksi didalamnya.<sup>13</sup>

Siapa pun yang mempelajari syariat Islam secara mendalam akan mendapati bahwa Islam mengatur peran perempuan dan laki-laki secara sempurna. Aktivitas keduanya diatur dengan seperangkat hukum yang terkumpul dalam “*alahrkam al khamshah*” (lima hukum perbuatan manusia: Wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram). Semua perbuatan manusia tidak terlepas dari salah satu hukum yang lima tersebut. Tidak ada satu pun amal manusia yang tidak ada

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 158



status hukumnya. Demikian juga ketika perempuan muslimah memainkan peran politiknya, dia tidak boleh abai terhadap status hukum masing-masing aktivitas yang akan dijalankannya. Dalam implementasinya pada kehidupan nyata harus kembali kepada derajat hukum perbuatan tersebut.

Terhadap perkara wajib maka dia tidak memiliki pilihan. Dalam keadaan apapun dia mesti berupaya melaksanakannya dengan segenap kemampuannya, seperti kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar yang tercantum dalam QS Al-Imran ayat 104. Salah satu wujud *amar makruf nahi mungkar* adalah berdakwah untuk menyeru manusia kepada Islam. Selain menyeru secara langsung pada individu, bentuk peran politik perempuan dalam aktivitas ini adalah keikutsertaannya dalam sebuah partai politik Islam yang berjuang untuk menegakkan sistem Islam secara kaffah.<sup>14</sup>

Penerapan kewajiban *amar makruf* yang lain adalah menjalankan pengawasan dan koreksi kepada penguasa untuk memastikan mereka menerapkan syariah secara *kaffah*. Jika penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar hukum syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa, maka wajib bagi setiap muslim termasuk kaum perempuan untuk menasihati penguasa supaya dia menyadari kelalaiannya dan kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.

Perempuan dalam perannya melakukan muhasabah atau koreksi terhadap penguasa ini bukan sekadar teori, namun benar-benar telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam. Sebagaimana pernah terjadi di masa kepemimpinan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 159

khalifah Umar bin Khaththab, ketika seorang perempuan memprotes kebijakan Umar dalam menetapkan jumlah mahar karena bertentangan dengan firman Allah.

Kewajiban berikutnya adalah melakukan baiat terhadap pemimpin negara. Kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam dipegang oleh seorang khalifah. Pengangkatan khalifah akan dianggap sah jika telah terjadi baiat yang sempurna dari sisi kaum muslimin, yaitu pernyataan kerelaan mengangkatnya sebagai pemimpin dan keridhaan untuk menaatinya selama mereka memberlakukan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Apabila ada sekelompok kaum muslim yang telah mewakili mereka melakukan baiat, maka sahlah seseorang yang dibaiat itu menjadi khalifah (pemimpin) yang harus ditaati oleh seluruh kaum muslimin.<sup>15</sup>

Dalam urusan pengangkatan pemimpin ini Islam memberikan hak dan kewajiban untuk melakukan baiat khalifah kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam pengangkatan dan pembaitan khalifah merupakan salah satu aktivitas politik perempuan dalam masyarakat.

Peran politik perempuan yang lain adalah memenuhi hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat. Peran ini bukanlah kewajiban namun termasuk hak mereka sehingga tidak mengikatnya. Majelis umat adalah sekumpulan wakil-wakil rakyat yang bertugas memberikan nasihat dari umat kepada khalifah, pemimpin mereka. Anggota majelis umat akan menyampaikan apapun yang dibutuhkan rakyat dan sekaligus menyarankan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keterlibatan perempuan untuk mewakili aspirasi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 160

umat ini tergambar dalam peristiwa Baiat Aqabah II. Sebagaimana Ibnu Hisyam meriwayatkannya dari Ka'ab bin Malik bahwa di antara 73 orang utusan laki-laki ada 2 orang wakil perempuan, yaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi.

Dalam menjalankan berbagai peran politiknya sudah seharusnya seorang muslimah melakukannya karena dorongan ingin terikat kepada ketentuan syariah. Bukan karena motivasi lain seperti demi memperjuangkan kesetaraan atau untuk mengejar eksistensi diri. Mereka yakin hanya dengan niat taat pada syariatlah yang akan menghantarkan mereka pada keberkahan hidup. Karenanya, sebelum terjun melibatkan diri, dia akan memastikan dulu status hukum perbuatan tersebut. Pemahamannya ini merupakan modal untuk bisa menanggapi dengan sikap yang tepat: Kapan aktivitas tersebut mengikat dan tidak memberikan alternatif pilihan? Kapan suatu amal berstatus mubah sehingga boleh dikerjakan atau ditinggalkan? Dan perbuatan mana saja yang justru haram dan harus dihindari?

Dalam Islam sudah jelas memberikan peran politik kepada perempuan sebagaimana Islam menetapkan peran politik kepada laki-laki. Adanya perbedaan peran kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan status kemuliaan masing-masing. Jabatan kepemimpinan dalam pemerintahan hanya boleh diemban oleh laki-laki dan haram diberikan pada perempuan. Ketentuan ini tidak berarti derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam Islam penentu mulia dan hinanya seseorang bukanlah peran yang dijalankan, namun

penentunya adalah derajat ketakwaannya di sisi Allah swt. dan Keduanya berhak mendapatkan balasan pahala yang sama tanpa ada perbedaan.<sup>16</sup>

Perempuan adalah makhluk dan hamba Tuhan sama halnya seperti laki-laki. Sebagai hamba Tuhan perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan menyejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, (laki-laki dan perempuan), potensi-potensi dan “*al-ahliyyah*” atau kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut Al-Qur’an saling bekerjasama untuk tugas keagamaan: menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-teks Al-Qur’an juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik tersebut.

Beberapa ayat Al-Qur’an ini dan masih ada ayat yang lain cukup menjadi dasar legitimasi betapa peran politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Peran mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.

Pertanyaan paling krusial dan spesifik adalah siapakah yang harus menjadi pemimpin politik tersebut?. Sepanjang penelusuran pada sumber otoritatif Islam

---

<sup>16</sup> Dedeh Wahidah Achmad, “Peran Politik Perempuan dalam Islam” (On-line), tersedia di: <https://www.muslimahnews.com/2020/03/29/peran-politik-perempuan-dalam-islam/> (29 April 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

terutama Al-Qur'an, tidak ditemukan satu ayat pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa jenis kelamin tertentu yang harus menjadi pemimpin politik. Al-Qur'an justru menyampaikan kisah tentang pemimpin perempuan di wilayah Saba, Yaman. Meski tidak disebutkan nama perempuan tersebut tetapi para ahli tafsir dan sejarawan menyebutnya Ratu Balqis. Dia merupakan seorang kepala pemerintahan dari sebuah wilayah yang luas. Kepemimpinannya disebut sukses. Al-Qur'an, surat al-Naml ayat 23, menyatakan:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۚ ٢٣

Artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” (Q.S. An-Naml ayat 23)<sup>17</sup>

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) Sukainah (cicit) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Peran perempuan juga muncul dalam sejumlah “*baiat*” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bin Ka'b, Ummu Athiyyah al-Anshariyyah, Ummu Sulaim binti Malhan, Umm Haram binti Malhan, Umm al Harits al-Anshariyyah, Rabi' binti al-Mu'awwadz, Rufaidah al-Anshariyyah dan lain-lain ikut serta bersama nabi

---

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.379.

dan para sahabat laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan orang-orang kafir. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah. Tsumal al-Qahramanah (w. 317 H) adalah hakim perempuan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan al Muqtadir. Dia tidak hanya mengadili perkara-perkara perdata tetapi juga pidana. Hadir dalam persidangannya para hakim, para ahli fiqh dan tokoh-tokoh masyarakat (al A'yan). Demikian juga Turkan Hatun al-Sulthan, hakim perempuan yang sukses, bukan hanya untuk mengadili perkara perdata, tetapi juga perkara-perkara pidana.

Islam adalah agama Tauhid (Monoteis). Yakni agama yang hanya menuhankan satu Tuhan dengan seluruh atribut kebesaran, ketinggian dan keindahan-Nya. Prinsip inilah yang melandasi seluruh gerak kehidupan manusia dan alam semesta. Doktrin ke-Esa-an Tuhan ini dengan sendirinya melahirkan tanggungjawab keagamaan kaum muslimin. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kebebasan (*al Hurriyyah*). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan.
2. Kesetaraan (*Musawah/Equality* dan *non diskriminasi*): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah.
3. Penghormatan manusia (Karamah al Insan/Dignity).
4. Kadilan (*'Adalah/Justice*).<sup>18</sup>

Demikianlah, sumber-sumber teologi Islam telah memberikan landasan yang fundamental bagi seluruh aktifitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Betapa

---

<sup>18</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h. 31.



dalam Islam memaknai peran perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Islam telah memberikan ruang bagi perempuan, sebagaimana juga laki-laki, untuk menjalani peran-peran politik/publik, untuk menjadi cerdas dan terampil serta untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Fakta-fakta sosial dalam periode sejarah Islam awal juga telah memperlihatkan kepada kita bahwa Islam benar-benar telah memberikan peran, akses dan fungsi kepada kaum perempuan dalam segala lini kehidupan. Itu semua dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Tuhan: mencerdaskan, membangun peradaban dan mensejahterakan umat manusia.

Bagi Indonesia status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktifitas-aktifitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Sejak awal kemerdekaannya, negara ini telah membuka ruang politik yang sama dengan laki-laki, antara lain dalam pemilihan umum. Hari ini konstitusi tersebut telah memuat pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia.

Untuk itu, perlu kiranya memaparkan pendapat para ulama tentang keterlibatan wanita dalam lembaga tersebut, dengan memaparkan dalil dan argumen dari kedua belah pihak, baik dari yang pro maupun yang kontra.

Pendapat pertama : mengharamkan keikutsertaan wanita dalam lembaga legislatif. Adapun dalil dan argumen yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Nash Al Qur'an :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ٣٤

Artinya: "Kaum laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka ( laki laki ) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki laki) itu menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri." (Q.S. An-Nisaa : 34)<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Allah swt. memberikan sifat *Qowamah* (kepemimpinan) kepada laki laki, dan *Qunut* (ketaatan) terhadap wanita. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi laki-laki adalah memimpin, dan kewajiban wanita adalah taat. Seorang kader dipersiapkan untuk memiliki fungsi *Qowamah*, karena akan mengatur berbagai persoalan bangsa. maka keikutsertaan wanita dalam lembaga tersebut berarti telah mengambil alih kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki, dan ini bertentangan dengan ketentuan Allah yang tertera dalam ayat di atas.

Dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... ٣٣

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu." (Q.S. Al-Ahzab : 33)<sup>20</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum wanita untuk berdiam di dalam rumah, dan tidak keluar kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak, dengan tanpa menampakkan perhiasannya. Ayat ini walaupun diturunkan pada istri-istri Nabi, tapi seluruh wanita muslimah juga terlibat

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 84.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 422.

didalamnya. *Sadduzzrai'* (menutup jalan yang mengarah kepada kemungkaran)

Keterlibatan wanita di dalam politik banyak memberikan dampak negatif bagi diri dan kehormatannya, juga bagi orang lain, terutama bagi anak dan keluarganya. Seperti *ikhthilath* saat kampanye, *khalwah* saat dilakukannya lobi, dan pertemuan, keluar rumah saat melakukan kunjungan dinas dan lain lain. Yang itu semua merupakan kemaksiatan yang harus dicegah, dan agar tidak terjadinya perbuatan maksiat seperti itu, maka wanita tidak diperbolehkan untuk ikut dalam parlemen.

## 2. Dalil Aqli :

Wanita memiliki hambatan alami, seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui dengan berbagai macam efeknya, yang itu semua membuat wanita tidak sanggup baik secara fisik maupun mental untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, seperti membuat undang-undang dan mengontrol pemerintah.

Pendapat kedua : membolehkan keikutsertaan wanita dalam proses kaderisasi politik. Adapun dalil dan argumen yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalil dalil umum yang menjelaskan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses penciptaan, potensi dan kemampuan, juga dalam hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun bangsa dan negara,

termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Diantara dalil dalil tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al Hujurat :13)<sup>21</sup>

Dalam ayat lain dijelaskan sebagai berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. An Nahl : 97)<sup>22</sup>

Dalil-dalil diatas menunjukkan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu Islam memandang laki-laki dan perempuan dengan pandangan yang sama, tidak ada yang membedakan keduanya kecuali takwa. Dengan landasan ini, maka *khithab-khithab* syari diarahkan kepada kedua jenis secara bersamaan, baik dalam bentuk mufrad maupun jamak, kecuali jika ada pengkhususan.

## 2. Dalil dalil khusus yang terkait dalam masalah ini.

<sup>21</sup>*Ibid.*,h. 517.

<sup>22</sup>*Ibid.*,h. 278.

a) Nash Al Qur'an :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ٧١

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya..." (Q.S. At-Taubah:71)<sup>23</sup>

Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab yang bersifat umum, yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang merupakan bagian dari sikap politik dalam Islam. Oleh karena itu, keikutsertaan wanita dalam proses kaderisasi partai politik diperbolehkan, karena politik adalah salah satu sarana untuk menegakan *amar ma'ruf nahi mungkar* terhadap negara dan pemerintahan.

Dalam ayat lain dijelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Mumtahanah:12)<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Ibid.,h. 198.

<sup>24</sup>Ibid.,h. 551.



Ayat ini menjelaskan adanya independensi wanita dalam bai'at, tidak ikut kepada laki-laki. Ini adalah sebuah pengakuan adanya kemandirian wanita dalam kepribadian dan potensi yang terkait dengan masalah masalah umum, karena bai'at itu dilakukan dalam masalah umum, dan itu bagian dari politik.

3. Keluarnya Aisyah *Radliallahu 'Anha* dalam perang jamal menuntut ditegakkannya keadilan adalah dalil yang kuat dan jelas diperbolehkannya seorang wanita untuk ikut dalam kancah politik, untuk menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman.

Jawaban terhadap dalil pendapat pertama :



1. Ayat yang mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (Q.S. An-Nisaa':34) adalah berkaitan dengan kehidupan suami istri, artinya suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas istrinya. Firman Allah "Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka", menunjukkan bahwa maksud kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan dalam keluarga.
2. Ayat yang memerintahkan wanita untuk berdiam di dalam rumah (Q.S. Al-Ahzab:33) adalah berkaitan dengan istri-istri Nabi Saw. seperti yang terlihat dengan jelas dari konteksnya, karena istri-istri Nabi mempunyai kehormatan dan disiplin yang berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Walaupun demikian, *ummul mukminin* Aisyah tetap keluar rumah untuk ikut dalam peperangan "jamil" untuk memenuhi tuntutan agamanya berdasarkan ijtihadnya saat itu, meskipun ada kemungkinan beliau salah dalam ijtihadnya itu. Disamping itu, realita sekarang banyak wanita yang keluar rumah, mereka pergi melakukan berbagai aktifitas yang dibutuhkan, seperti ke sekolah atau universitas, ke tempat kerja sebagai dokter, guru, pegawai, dan tidak ada seorangpun yang menolaknya. Hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai konsensus dibolehkannya kaum wanita bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Sisi lain ada sebuah tuntutan agar wanita muslimah yang berkomitmen untuk memasuki dunia politik, baik sebagai pemilih atau dipilih, untuk menghadapi wanita sekuler yang mengklaim bahwa merekalah yang memegang kendali kaum wanita.

Bahkan bisa jadi memenuhi tuntutan sosial dan politik itu lebih penting daripada memenuhi tuntutan pribadi.<sup>25</sup>

3. Adapun hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menyatakan tidak akan adanya keberuntungan bagi suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita, yang dimaksudkan adalah menyerahkan kekuasaan umum sebagai kepala negara. Hal ini terlihat dalam kata "*Amruhum*" yang berarti kepemimpinan secara umum. Adapun kepemimpinan dalam sebagian masalah, maka tidak ada halangan bagi kaum wanita untuk mengembannya. Seperti otoritas dalam berfatwa, berijtihad, meriwayatkan hadits, termasuk keikutsertaannya dalam proses kaderisasi. Dalam masalah masalah di atas otoritas dan kepemimpinan wanita telah diakui secara konsensus, dan telah dijalankan oleh kaum wanita dalam beberapa masa. (bahkan Abu Hanifah membolehkan wanita menjadi seorang hakim)
4. Mengenai penggunaan dalil *sadduzzaroi* memang diperlukan dalam mencegah terjadinya kemungkaran, tapi berlebih-lebihan dalam menggunakannya juga tidak baik, sama halnya dengan berlebih lebihan dalam mengabaikannya.
5. Adapun dalil aqli yang mengatakan bahwa wanita sering mengalami hambatan alami, seperti haid, hamil dan melahirkan itu benar, tapi tidak semua wanita pantas dan berhak untuk menjadi anggota legislatif. Yang berhak untuk menjadi anggota legislatif adalah wanita yang

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera

keikutserataannya tidak berdampak negatif kepada keluarganya atau lingkungan kerjanya, seperti wanita yang tidak memiliki anak, atau anak anaknya sudah pada dewasa, juga wanita yang tidak menimbulkan fitnah dengan dandanan dan kecantikannya. Dan itupun bila mereka memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan.<sup>26</sup>

Jawaban untuk dalil pendapat kedua :

1. Mengenai dalil-dalil yang menunjukkan adanya kesamaan wanita dan laki-laki dalam proses penciptaan manusia bisa diterima, bahkan sebagaimana laki-laki iapun akan mendapatkan pahala dari amal yang ia kerjakan. Tapi itu bukan berarti ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki, kerana keduanya memiliki watak dan karakter yang berbeda.
2. Ungkapan yang mengatakan bahwa firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 71 menerangkan tentang kesamaan laki laki dan perempuan dalam ber-*amar ma'ruf nahi mungkar* adalah benar, tapi masing masing memiliki cara dan lingkup yang berbeda, sesuai dengan watak dan karakternya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya : "Sesungguhnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu intinya adalah mengajak kepada Islam, kemudian berperang untuk Islam. Dan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, ia hanya bisa dilakukan oleh penguasa jika berkaitan dengan penegakkan *hudud* dan *ta'zir*.

---

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera menfatwakan sebagai berikut :

1. Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari Islam.
2. *Amar ma'ruf nahi mungkar* adalah kewajiban bersama; laki laki dan perempuan.
3. Politik adalah sarana untuk ber-*amar ma'ruf nahi mungkar*, berarti keikutsertaan wanita dalam kancah politik adalah sebuah kebutuhan.
4. Keikutsertaan wanita dalam dunia politik termasuk menjadi pemimpin diperbolehkan atas dasar maslahat yang ril dan kebutuhan yang mendesak, dengan memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan izin dari suami.
  - b. Tidak mengganggu tugas-tugasnya dalam rumah tangga.
  - c. Adanya kemampuan moral maupun struktural untuk menghindari fitnah.
  - d. Harus memperhatikan aturan-aturan Islam, ketika ia bertemu, berkumpul dengan laki-laki, seperti cara berbicara, berpakaian, berdandan, berkumpul dengan laki-laki tanpa mahrom atau berbaur tanpa batas.<sup>27</sup>
5. Keikutsertaan wanita dalam Politik dibatasi dengan faktor kebutuhan, dan tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, baik minimal maupun maksimalnya. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh :

الحاجة تقدر بقدرها

Artinya:" Hajat (kebutuhan) itu diukur sesuai dengan bataskebutuhannya.

---

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera

### C. Hak Politik Perempuan dalam Islam

Pada era globalisasi pembangunan nasional dalam hal sumber daya manusia mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu, kepedulian *holistic* yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang Iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.<sup>28</sup>

Perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya perempuan perlu dikembangkan. Namun keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah, masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama ataupun karena budaya. Demikian pula, wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> <sup>28</sup> Nurhikmah, "*Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1, 2014, h. 67, Mengutip, Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah* (Dar al-Shurq, 1997), h.160.

<sup>29</sup> Yuni Harlina, "*Hak Politik Perempuan dalam Islam*", Jurnal marwah, Vol. XIV No. 1, 2015, h. 2.

Dalam mendefinisikan hak politik maka terlebih dahulu akan diuraikan sepiantas mengenai pengertian hak asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan sumber bahkan dasar dari adanya hak politik, sehingga tiap-tiap warga negara berbeda-beda dalam memaknai konsep hak asasi manusia tersebut, hal ini disesuaikan budaya masing-masing negara yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada harkat dan martabat setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibawa sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), dan hal itu harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang tanpa terkecuali. Adapun dalam konteks Indonesia hak-hak dasar itu antara lain: hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak mendapat pekerjaan, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak mengeluarkan pendapat.

Hak asasi manusia dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat erat kaitannya dengan demokrasi, yaitu hak dibidang politik, hak ini melekat pada status warga negara yang disebut sebagai hak politik.<sup>31</sup>

Wanita adalah manusia yang dibebani kewajiban sebagaimana halnya pria. Ia berkewajiban menyembah-Nya, menegakkan agama, menunaikan kewajiban, menjauhkan yang haram, berdakwah dalam kebaikan serta *amar ma'ruf nahi munkar*. Wahyu Ilahi mencakup pria dan wanita, kecuali ada dalil yang menerangkan tentang spesifikasi wahyu hanya untuk kaum pria. Manakala Allah

---

<sup>30</sup>Dahlan Thayeb, *Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 47.

<sup>31</sup>Abdi Yusran, "Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". (Skripsi Program Sarjana Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin, Makasar, 2010), h.10.



swt. berfirman: *yaa ayyuhan naas* (wahai sekalian manusia) atau *yaa ayyuhal ladziina aamanuu* (wahai orang-orang yang beriman), maka wanita juga termasuk di dalamnya. Ummu Salamah ketika mendengar seruan Nabi: "*ayyuhan naas*" (wahai manusia) lantas ia segera menjawab panggilan tersebut, padahal ia tengah dalam kesibukannya. Para sahabat heran dengan sikapnya yang begitu tergesa-gesa. "Saya juga manusia", kata Ummu Salamah saat itu.<sup>32</sup>

Dalam sejarah perjalanan Islam di muka bumi ini, kita dapat menemukan beberapa wanita berkecimpung di medan politik membantu suatu pasukan, berdasar atas kepiawaiannya berdiplomasi dan kelembutannya yang menakjubkan seperti yang terjadi saat perang antara Ali dan Muawiyah. Banyak wanita ketika itu membantu Ali, seperti Hindun bin Yazid al-Anshariyah, Zarqa bin 'Uda ibn Qais, Umm Khair al-Bariqiyah, 'Aqrasyah binti al-'Athrusy. Muawiyah sampai terheran-heran dengan banyaknya wanita yang memusuhi dan menyampaikan orasi menentang dirinya. Akhirnya, dia sendiri mencari beberapa orator wanita untuk berdialog dan mencari tahu apa yang ingin dikatakan para wanita itu setelah terbunuhnya Ali.<sup>33</sup>

Al-Quran menyebut dua jenis (laki-lakidan perempuan) bertanggungjawab dalam penegakan dan perbaikan masyarakat dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Manakala kaum wanita munafik turut berperan merusak tatanan kehidupan masyarakat, di pihak laki-laki juga terdapat orang-orang munafik yang dapat

---

<sup>32</sup> Nurhikmah, "*Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1, 2014, h. 67, Mengutip, Yusuf Qaradhwai, *Fiqh al-Daulah* (Dar al-Shurq, 1997), h.160.

<sup>33</sup> Nurhikmah, "*Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1, 2014, h. 64, Mengutip Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, 'Azamatul Islam (Juz II; Kairo: Maktab al-Usrah, 2002), h. 47.

merusak masyarakat. Maka bagi kaum wanita berkewajiban untuk memperbaiki keadaan masyarakat sebagaimana halnya dengan kewajiban laki-laki.

Pada masa Nabi, gaung suara pertama yang mempercayai kenabian Muhammad saw. dan mendukung beliau adalah seorang wanita, Khadijah ra., yang kemudian menjadi isterinya. Manusia pertama yang *syahid fii sabilillah* pun wanita, yaitu Samiyyah Ummu Amar r.a. Dalil-dalil yang kita lihat dalam Quran dan Sunnah umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali perbedaan dengan latar belakang fitrah kewanitaannya: dalam rumah tangga, yang satu laki-laki dan satunya perempuan.

Wanita mempunyai hukum-hukum tersendiri, menstruasi, nifas, istihadhah, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh dan sebagainya. Sedang laki-laki memiliki level *qawama'*, *leadership*, tanggungjawab terhadap keluarga serta hak memberi nafkah keluarga. Terdapat pula hukum waris yang masing-masing mempunyai bagian tersendiri, dua wanita sama dengan bagian satu laki-laki. Sebabnya sangat jelas, karena dihitung berdasarkan perbedaan jerih payah dan seorang wanita menjabat perdana menteri, meskipun jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam *al-wilayah al-kubra* atau *alimamah al-uzhma* (pemimpin tanggungjawab antara pria dan wanita. Dengan demikian, tak ada halangan tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan.<sup>34</sup> Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam

---

<sup>34</sup> Muhammad Azhar, Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 70.

masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri.<sup>35</sup>

Agama Islam sangat adil dan proporsional terhadap wanita. Sebagai salah satu buktinya Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum. Adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, selain itu Islam juga menetapkan sikap proporsional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kaum wanita memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Islam. Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Wanita difahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik serta banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita.

Dalam sejarah perjalanan Islam kita akan menemukan fakta-fakta kesetaraan gender yang kita biasa sebut sebagai "Hak Berpolitik". Di dalamnya termasuk hak-hak wanita dalam pemilihan, pencalonan jabatan politik, serta hak berpartisipasi dalam *public affair*. Hal ini dapat kita saksikan dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali pembedaan dengan latar belakang fitrah kewanitaannya: dalam rumah tangga, yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Wanita mempunyai hukum-hukum tersendiri, menstruasi, nifas, istihadhah, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh, dsb. Sedangkan laki-laki memiliki level

---

<sup>35</sup>Nurhikmah, "*Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1, 2014, h. 68, Mengutip, Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah* (Dar al-Shurq, 1997), h.248.

'qawamah', leadership, tanggungjawab terhadap keluarga serta hak memberi nafkah keluarga.<sup>36</sup>

Dalam konteks perempuan beserta haknya terhadap politik, Al-Qur'an membahas tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai segi kehidupannya. Ada yang menguraikan keistimewaan perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum, misalnya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisaa':32)<sup>37</sup>

Menurut firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 32 tersebut hak politik menurut ahli hukum ialah hak yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu juga hak politik dapat diartikan sebagai hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negaranya.

Adapula yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam hal mendapatkan hak-hak dalam politik. Permasalahan hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi

<sup>36</sup>Nurhikmah, "Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1, 2014, h.69-70.

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.83.

yang berbeda, pertama: perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua: perempuan ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen, Untuk mengetahui ketentuan dalam kedua permasalahan ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan bahwa kewenangan itu ada dua yaitu kewenangan khusus dan kewenangan umum.

Yang dimaksud kewenangan umum ialah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat seperti kewenangan pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum. Sedangkan kewenangan khusus ialah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta dan pengaturan wakaf.

Dalam hal ini syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua. Perempuan memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki oleh laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.<sup>38</sup> Hal ini didasarkan terhadap firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-taubah: 71)<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Ikwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, menelusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam*, (Amzah, 2008), h. 38.

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.198.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan sama halnya dengan laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum.

Adapun perempuan dalam berpolitik memiliki hak-haknya, diantara hak politik perempuan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Memilih dan Membai'at Khalifah

Dalil atas hal ini berdasarkan bai'at perempuan pada masa Rasulullah SAW. di antaranya dari Ayyub, dari Hafsa, dan dari Ummu Athiyah berkata (yang artinya) "Kami membaiat Rasulullah SAW lalu beliau membacakan kepadaku, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan melarang kami melakukan niyah (menangisi mayat)"

Karena itulah, seorang perempuan dari kami menarik tangannya lalu perempuan itu berkata: "Seseorang telah membuatku bahagia dan aku ingin membalas jasanya." Rasulullah tidak berkata apa-apa, lalu perempuan itu pergi dan kembali lagi." (HR. Bukhari)

Dalam syarah (penjelasan) hadits ini, dijelaskan bahwa salah seorang dari kaum perempuan yang membaiat Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa salam* melepaskan genggamannya/jabat tangannya karena hendak meratapi mayat sahabat yang pernah membahagiakannya. Sedangkan, para perempuan lainnya tetap dalam keadaan membaiat Rasulullah. Hadits ini sekaligus menjadi dalil bahwa para perempuan tersebut membaiat Rasulullah dan Beliau pun menerima bai'at mereka.



## 2. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Majelis Umat

Hal ini di dasarkan pada riwayat shahih dari Ibnu Hisyam, dari Ka'ab bin Malik terkait dengan baiat Aqabah II. Disebutkan bahwa setelah 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan dari suku Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah melakukan baiat Aqabah II, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk memilih wakil-wakil mereka.

Rasulullah berkata kepada mereka, “Datangkanlah dua belas wakil kalian yang akan bertanggung jawab atas kabilahnya masing-masing...” Seruan ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus memberikan hak untuk memilih wakil yang akan mewakili kaumnya kepada keduanya. Selain itu, Rasul juga tidak menentukan bahwa wakil rakyat yang dipilih itu harus laki-laki saja. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk menjadi wakil rakyat.

Para wakil rakyat yang terpilih inilah yang nantinya akan berkumpul pada lembaga negara yang dinamakan Majelis Umat. Tugas majelis ini adalah melakukan koreksi atau memberikan nasihat kepada khalifah. Mereka mengajukan hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat sekaligus memberikan saran terkait bagaimana kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Selain itu, mereka juga mengoreksi tindakan penguasa jika dalam tata cara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan khalifah terdapat hal yang bertentangan dengan syariat. Hanya saja, perlu dipahami bahwa lembaga ini bukanlah lembaga kekuasaan sebagaimana dalam sistem demokrasi. Majelis umat tidak

melakukan legislasi undang-undang sebagaimana dewan perwakilan rakyat pada masa kini.

### 3. Menasehati dan Mengoreksi Penguasa

Rasulullah SAW bersabda (yang artinya): “Agama itu nasihat.” Ditanyakan, 'Kepada siapa ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kepada Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan rakyat mereka.’” (HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan bahwa jika para penguasa melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum syariat atau terdapat kekeliruan dalam mengurus urusan atau memenuhi kebutuhan rakyat, maka kaum muslim berkewajiban untuk melakukan *muhasabah* kepada penguasa supaya kesalahannya bisa diperbaiki. Dalam hal ini, bisa disampaikan langsung kepada penguasa atau melalui wakil mereka di majelis umat. Salah satu kisah masyhur terkait hal ini adalah ketika Umar bin Khattab dikoreksi oleh seorang perempuan terkait kebijakan pembatasan jumlah mahar.

### 4. Melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* sejatinya adalah kewajiban bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang meyerukan kebaikan (Islam) serta melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mereka itulah golongan yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)<sup>40</sup>



Maka, keterlibatan perempuan dalam politik juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan ayat ini dalam menjalankan *amar ma’ruf nahi mungkar*. Aktivitas tersebut bisa juga dijalankan melalui keterlibatannya dalam partai politik. Hanya saja, perlu dicatat bahwa keterlibatan perempuan dalam politik ini

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,h.63.

bukan untuk memuluskan jalan menjadi penguasa, sebagaimana dalam sistem demokrasi. Terkait hal ini, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa salam* sendiri telah melarang perempuan sebagai pemegang tampuk kekuasaan dengan sabda Beliau (yang artinya): “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusan (kekuasaan pemerintahannya) diserahkan kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari)

Keterlibatan perempuan dalam politik, selain untuk *amar ma'ruf nahi mungkar* juga untuk memaksimalkan perannya dalam membina kesadaran politik umat yaitu dengan melakukan edukasi tentang hak dan kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya. Sehingga, rakyat memahami kewajibannya sebagai rakyat. Sekaligus, mengetahui hak yang harus dipenuhi pemimpin. Sehingga, mereka menjadi warga negara yang taat namun tetap kritis dalam memberi koreksi jika ada kebijakan penguasa yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya.

#### **D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perempuan Dalam Politik Islam**

Pada dasarnya politik adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan. Lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki. Melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar.

Ketika kita bicara mengenai politik kita juga harus berbicara mengenai insan politiknya, yang di maksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan

sekaligus objek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab *Fiqh Siyasah*. Namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan. Yaitu wacana politik kaum perempuan sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik. Kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti. Bahkan termarginalkan. Di akui atau tidak, domain yang di sediakan oleh *Fiqh siyasah*, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam *fiqh siyasah* ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin). Tetapi bagaimana konsepsi *fiqh* dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini :

#### 1. Pendapat konservatif

Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini. Misalnya, Imam Ghazali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa di dudukan sebagai imam (kepala negara) menurutnya bagaimana bisa seorang

---

<sup>41</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung : Mizan 2001 ), h.189.

perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum. Larangan perempuan menjadi pemimpin ini yang melatar belakangi para ulama-ulama adalah dengan adanya hadist Rasulullah Saw sebagai berikut :

لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَرَسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالُوا  
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Tatkala ada berita sampai kepada Nabi *shallallahu ‘alaihiwasallam* bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau *shallallahu ‘alaihiwasallam* lantas bersabda, “Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita” (H.R. Bukhari no. 4425)

Hadist ini dari segi riwayatnya tidak seorang pun pakar hadist yang mempersoalkan ke-*shahihan*-nya. Sedangkan dari segi *diroyah dalalah* hadist ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang kekuasaan Negara. Menurut paham konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wiayah khusus (*domestic role*). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.<sup>42</sup>

## 2. Pendapat Liberal-Progresif

Pendapat liberal-progresif adalah yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h.191.

mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki.

Kaum ulama dari golongan khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an tentang konsep *al-adalah* (keadilan) dan *al-musawah* (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam, dan juga sebagai Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik Indonesia. Tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan.

Respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara. Terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya. Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah dipersentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus dikritik dan disikapi secara hati-hati. Tetapi juga melakukan revatilisasi tradisi.<sup>43</sup>

Dalam konteks ini, NU menjadikan kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti : HAM, Demokrasi, *Civil Society* termasuk juga kesetaraan gender, dengan munculnya calon-calon ulama perempuan di Indonesia ini sebagai salah satu indikator awal akan terbebasnya perempuan dari belenggu penindasan dan

---

<sup>43</sup>www. Gp-ansor.com (on-line) tersedia di <https://ansor.id> ( 02 februari 2020)



ketidakadilan. Sudah saatnya perempuan tampil di ruang publik untuk mengayomi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan.

### 3. Pendapat Apologis

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar di bandingkan dengan porsi rasionalnya. Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli Fiqh zaman klasik.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung : Mizan 2001 ), h.195.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet ke-1, 2004.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah*, Beirut: Dar al Ummah, 2005.
- Atiyyah al-Abrasyi, Muhammad. *'Azamatul Islam*. Juz II; Kairo: Maktab al-Usrah, 2002.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta : UNY Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fadli, Yusuf. *"Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi"*. Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Fauzi, Ikwan. *Perempuan dan Kekuasaan, menelusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam*, Amzah, 2008.
- Ferdian, Ridho. 2019. *Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai Dibidang Kepemudaan* Skripsi. Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Harlina, Yuni. *"Hak Politik Perempuan dalam Islam"*, Jurnal marwah, Vol. XIV No. 1, 2015.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung : Mizan 2001.
- Kartono, Kartini. *Metodelogi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- . *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 1994.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nurhikmah, "*Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1, 2014.

Rivai, Vietzal. *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2006.

Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2010.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Thayeb, Dahlan. *Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Cet-1, Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MK, 2011.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Yusran, Abdi. 2010. *Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia* Skripsi. Program Sarjana Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin, Makasar.

## **Wawancara**

Wawancara, Agus Djumadi, Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung, Lampung. 6 Januari 2020.

Wawancara, Joko Mulyono, Ketua Kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung, Lampung. 5 Januari 2020.

Wawancara, Dinia Rumania, Sekretaris Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung, Lampung. 5 Januari 2020.

Wawancara, Ida Fitriyana, Sekretaris bidang kepemudaan DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung, Lampung. 5 Januari 2020.

Wawancara, Mastini, Sekretaris bidang kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung, Lampung. 5 Januari 2020.

Wawancara, Yuni Karnelis, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Bandar Lampung, Lampung. 5 Januari 2020.

### **Sumber lain**

Azam Tekpal, "Pengertian Kaderisasi" (On-Line), Tersedia di <http://azamtekpai.blogspot.com/2015/arti-kaderisasi.html?m=1> (10 Oktober 2019)

Dede Wahidah Achmad, "Peran Politik Perempuan dalam Islam" (On-line), tersedia di: <https://www.muslimahnews.com/2020/03/29/peran-politik-perempuan-dalam-islam/> (29 April 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<http://www.wikipedia.org/perempuan>, (10 Oktober 2019)

Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (On-line), tersedia di : <http://partaipks.id> (diakses tanggal 26 Februari 2020)

[www.gp-ansor.com](http://www.gp-ansor.com) (on-line) tersedia di <https://ansor.id> (02 februari 2020)